

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan di Indonesia mengadopsi suatu pemerintahan yang mengarah pada pemerintahan Negara Belanda, bukan hanya dalam urusan pemerintahan saja, namun dalam menyusun suatu anggaran keuangan negara dan segala sistem keuangan negara nya pun mengarah pada pemerintahan Negara Belanda, sejak mengadopsi sebuah peraturan pemerintahan Belanda sampai tahun 2004, sistem keuangan yang digunakan pemerintahan Indonesia masih menggunakan sistem akuntansi pembukuan tunggal (*single entry*). Sistem tersebut belum menunjukkan sebuah pertanggungjawaban yang pasti atas pengelolaan laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut menjadikan sebuah kemudahan dan keunggulan belum dirasakan, terutama dalam hal audit laporan keuangan negara yang belum berjalan dengan baik. Kondisi seperti itulah pada akhirnya muncul sebuah sistem pemerintahan Indonesia yang berawal dari sentralisasi atau terpusat menjadi desentralisasi.

Sentralisasi ialah segala sesuatu bentuk kegiatan yang pemerintahannya dilakukan terpusat oleh pemerintah pusat dan sudah digunakan sejak lama di Indonesia sebelum munculnya suatu kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai otonomi daerah yang menyebutkan bahwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah

kepada daerah otonom ialah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya sendiri. Hakikat sebuah otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan segala bentuk operasional ataupun kegiatan dalam pemerintah daerah. Laporan keuangan harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun akan diperiksa oleh BPK dan setelah itu dipertanggungjawabkan ke DPRD propinsi/kabupaten/kota. Tujuan dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah adalah memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan memenuhi syarat yaitu diakuntansikan dengan baik dan benar, dilaporkan secara lengkap, diaudit secara independen. Karakteristik tersebut harus dipenuhi, oleh karena itu dalam hal pengelolaan keuangan tidak terlepas dari peran manusia-manusia yang ada di dalamnya dalam melakukan pelaporan keuangan. Pemanfaatan SDM saja tidak cukup melainkan harus dibarengi pula dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut tentu akan lebih mudah.

Akhir-akhir ini terlihatnya tuntutan masyarakat akan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Daerah menimbulkan reformasi dalam penyajian laporan keuangan yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami kepada publik. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap publik atau masyarakat melainkan juga harus bertanggung jawab pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai wujud yang sebenarnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan yang selanjutnya akan dipublikasikan pada masyarakat luas.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan oleh BPK, yakni opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau tidak memberi pendapat (TMP). Suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinilai baik apabila telah mendapat hasil opini dari BPK berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut di bawah ini terdapat tabel yang menunjukkan data opini dari BPK yang berhasil dicapai oleh setiap kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2011-2018.

**Tabel 1. 1 Opini BPK Pada Pemerintahan di Jawa Barat Tahun 2011-2018**

No	Entitas Pemda	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	-	-	-	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP DPP	WTP						
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan sumber data di atas menunjukkan bahwa terdapat 28 pemerintahan

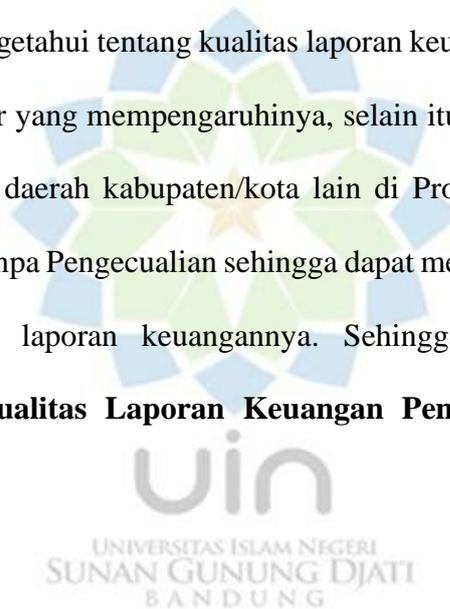
Kabupaten atau Kota di Jawa Barat yang masing-masing mendapatkan opini

berbeda-beda dari tahun ke tahun. Namun, berbeda pada Kota Depok yang bisa kita lihat dalam tabel di atas pada baris nomor 26 yang menunjukkan bahwa Kota Depok sejak tahun 2011-2018, delapan tahun berturut-turut, Kota Depok selalu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan keberhasilan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian, maka akan mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah terutama di bidang keuangan daerah. Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Terutama mengenai faktor-faktor yang dapat diraihinya Wajar Tanpa Pengecualian selama delapan tahun berturut-turut. Dan dengan tidak didapatnya predikat WTP dari BPK kepada pemerintah daerah secara umum disebabkan belum berkualitasnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti mengemukakan beberapa alasan melakukan penelitian ini. Pertama, pengelolaan keuangan daerah sangat vital bagi suatu daerah karena berkaitan dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kedua, wujud akuntabilitas dan transparansi atas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah maka pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Ketiga, hasil dari laporan keuangan dalam suatu pemerintahan, baik pusat maupun daerah akan menjadi salah satu instrumen dalam pengambilan suatu keputusan yang tepat. Keempat, pengambilan keputusan yang tepat dapat diperoleh dari hasil kualitas laporan keuangan pemerintahan yang baik. Kelima, salah satu terwujudnya kualitas laporan keuangan

yang baik adalah mendapatkan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keenam, berdasarkan data tabel 1.1 Opini BPK pada Pemerintahan di Jawa Barat Tahun 2011-2018 di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kota Depok selalu meraih predikat opini WTP dari BPK, dengan fenomena yang terjadi tersebut maka peneliti tertarik untuk membahasnya lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian alasan peneliti di atas maka peneliti ingin lebih mengetahui tentang kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, selain itu juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi daerah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat yang belum meraih Wajar Tanpa Pengecualian sehingga dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Sehingga, peneliti melakukan penelitian berjudul: **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2018**



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kota Depok selalu meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2011-2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

2. Hasil dari predikat WTP yang dihasilkan Pemerintah Kota Depok merupakan wujud dari proses penyusunan laporan keuangan yang baik yang menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik juga. Untuk menghasilkan kualitas dalam laporan keuangan pemerintah tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan pemerintahan di Kota Depok tersebut.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik kualitas yang dimiliki laporan keuangan Pemerintah Kota Depok pada tahun 2018?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok dalam mendapatkan opini WTP dari BPK pada tahun 2018?
3. Bagaimana strategi pemerintahan Kota Depok dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2018?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik kualitas yang dimiliki laporan keuangan pemerintah Kota Depok pada Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan pemerintah Kota Depok dalam mendapatkan opini WTP dari BPK Tahun 2018.
3. Untuk mengetahui strategi pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat meraih opini WTP dari BPK Tahun 2018.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menambah sumber pengetahuan mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok.
- b. Sumber informasi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- c. Berkontribusi dalam bidang administrasi publik, khususnya mengenai laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti
  - 1) Penelitian ini dapat berguna sebagai sarana belajar suatu kegiatan yang bermanfaat dalam meningkatkan wawasan keilmuan di bidang Administrasi Publik khususnya Keuangan Pemerintahan.
  - 2) Penelitian ini berguna sebagai pengalaman peneliti yang berkaitan langsung dengan bidang keuangan ataupun akuntansi sektor publik.

b. Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan khususnya Badan Keuangan Daerah Kota Depok untuk terus menjaga semangat dan kinerja baik nya dalam menyajikan laporan keuuangan pemerintahan. Terutama dalam menjaga kualitas dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Penelitian ini diharapkan berguna dalam menentukan strategi untuk terus menjaga predikat opini WTP yang didapatkan dan berguna dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada kajian yang sama.
- 2) Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan maupun bahan referensi dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Bagi Masyarakat

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk transparansi akan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dikelola baik oleh pemerintahan Kota Depok.
- e. Bagi Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
- 1) Dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kampus.
  - 2) Dapat menunjang peningkatan kualitas kampus berkaitan dengan kegiatan penelitian bagi mahasiswa.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran terdiri dari tiga konsep yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Operational Theory*. *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keuangan Daerah, *middle theory* yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan *operational theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Suwanda (2018: 66) menjelaskan pengertian laporan keuangan pemerintah daerah yaitu: "Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan

penyelenggaraan operasional pemerintahan dan hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintahan untuk pertanggungjawaban di setiap akhir tahun anggaran.”

Karakteristik kualitas laporan keuangan merupakan prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah memenuhi kualitas yang dikehendaki, berikut kualitas laporan (Suwanda, 2018: 68)

#### 1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan dengan membantunya mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*);
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*);
- c. Tepat waktu;
- d. Lengkap

#### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian jujur;

- b. Dapat diverifikasi;
- c. Netralitas.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Menurut Suwanda (2015) dalam jurnal penelitiannya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. PP ini mempunyai 3 lampiran, yaitu:

- a. Lampiran I tentang SAP berbasis akrual
- b. Lampiran II tentang SAP berbasis kas menuju akrual.

- c. Lampiran III tentang proses penyusunan SAP berbasis akrual.

Pengimplementasian sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas
- b. Mendukung operasi rutin harian
- c. Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- d. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- e. Meningkatkan akuntabilitas finansial
- f. Melindungi aset pemerintah daerah

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah yang baik, satuan kerja harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar belakang Pendidikan akuntansi, sering mengikuti Pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

## 3. Sistem pengendalian intern (SPI)

Sistem pengendalian internal (SPI) meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan dan pengendalian. Komponen sistem pengendalian intern

sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, terdiri atas lima komponen, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian risiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Informasi dan komunikasi Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

d. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

#### 4. Komitmen organisasi

Menurut Meyer & Ellen dalam Umam (2010: 257) menyebutkan bahwa: terdapat dua pendekatan dalam merumuskan definisi komitmen dalam berorganisasi. Pertama, usaha dalam segala bentuk. Maksudnya, komitmen bermakna perbedaan hubungan antara anggota organisasi dan entitas lainnya. Kedua, usaha dalam memisahkan berbagai entitas tempat individu berkembang sehingga memiliki komitmen. Kedua pendekatan tersebut tidak mengarah pada definisi komitmen, melainkan mengenai proses perkembangan suatu komitmen dan bagaimana implikasinya terhadap individu dan organisasi.

Menurut Baron dan Greenbarg (1990) dalam Umam (2010: 259) menyatakan bahwa: komitmen adalah penerimaan yang kuat dalam diri individu terhadap tujuan dan nilai-nilai perusahaan, sehingga individu tersebut akan berusaha dan berkarya diikuti hasrat yang kuat sehingga dapat bertahan. Meyer dan Allen (1991) menyebutkan tiga dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu sebagai berikut:

1. *Affective commitment*, berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dalam kegiatan di organisasi.
2. *Continuance commitment*, berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi sehingga akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan tipe ini akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota organisasi tersebut.

3. *Normative commitment*, menggambarkan perasaan terikat untuk terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan tipe ini akan terus menjadi anggota karena merasa dirinya harus berada dalam organisasi tersebut.

#### 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

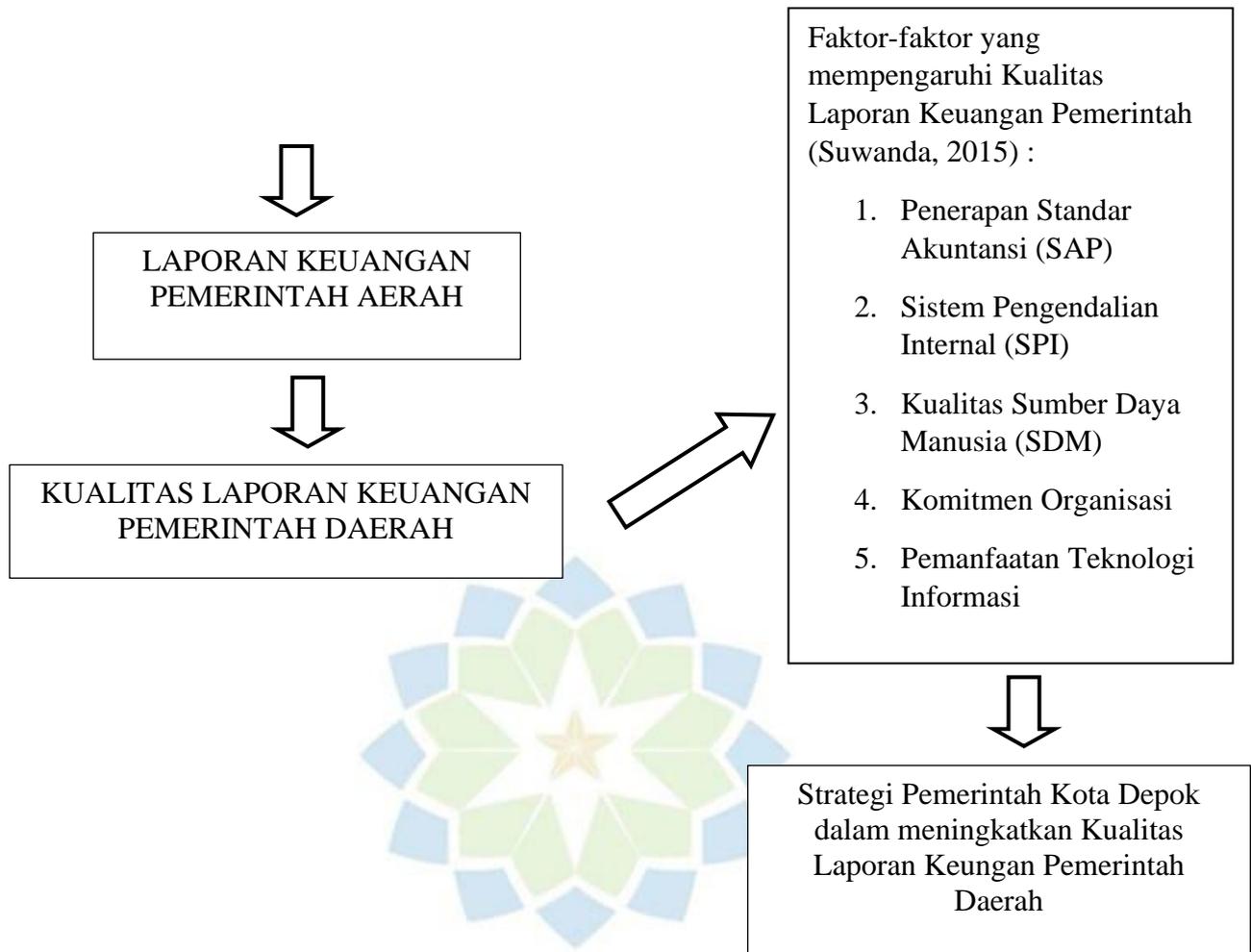
Teknologi informasi adalah istilah umum teknologi yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan dan mengkomunikasikan informasi. Perangkat pendukung dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras adalah perangkat yang berwujud fisik dengan kasat mata serta perangkat lunak, meliputi perintah-perintah yang berisi program, data yang melengkapi, dan mempunyai tugas yang menghubungkan manusia dengan perangkat kerasnya. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Peneliti memilih teori Dadang Suwanda alasannya karena memiliki kecocokan dengan masalah penelitian yang ada di Kota Depok dalam laporan keuangan pemerintah yakni mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Depok, sehingga dapat meraih opini WTP dari BPK pada tahun 2018.

Berikut di halaman selanjutnya terdapat sebuah gambar kerangka pemikiran yang disusun oleh peneliti.

KEUANGAN DAERAH





**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

### G. Proposisi

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok dapat dikatakan sudah baik hasilnya dan dapat diketahui dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yaitu: 1) Penerapan standar akuntansi pemerintahan/ SAP; 2) Sistem pengendalian Internal/SPI; 3) Kualitas Sumber Daya Manusia; 4) Komitmen Organisasi dan; 5) Pemanfaatan Teknologi Informasi